

Abstrak

Di dalam kultur masyarakat Indonesia perempuan terlibat kedalam politik merupakan hal yang tabu. Di Kuningan Jawa Barat keterisian perempuan didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya berkisar 20% saja tentu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni mengenai kebijakan afirmasi 30%. Selain itu, kondisi masyarakat yang masih cenderung patriarki menjadi penyebab kurang diminatinya perempuan di ranah politik. Kendati demikian, perlu dilihat lebih jauh bagaimana peran legislator perempuan ini dalam perumusan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan.

Melihat permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul “Perempuan dan Politik : Studi Kasus Dinamika dalam Perumusan Perda Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kuningan”. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data dan dianalisis dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori utama yakni teori keterwakilan perempuan dan *affirmative action*.

Hasil penelitian yang sudah penulis observasi dalam karya tulis ilmiah ini adalah terdapat hambatan pada perumusan perda Ketahanan Keluarga yakni kurangnya ketersediaan anggaran dalam perumusan peraturan daerah Ketahanan Keluarga, namun demikian keadaan tersebut tidak mempengaruhi proses perumusan perda ketahanan keluarga. Sementara itu keadaan ini didorong oleh tidak adanya penolakan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kuningan, hal ini dikarenakan perda ketahanan keluarga merupakan kebijakan inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci : *legislator perempuan, keterwakilan perempuan, kebijakan afirmasi perda ketahanan keluarga*

